

# Best Practices Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat dan CSO untuk Pembangunan Rendah Karbon



2021

# DAFTAR ISI

---

<b>I</b>	<b>Komitmen Memangkas Gas Rumah Kaca</b>	<b>3</b>
<b>II</b>	<b>Etalase Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan CSO</b>	<b>7</b>
<b>III</b>	<b>Pelestarian Lahan Gambut</b>	<b>9</b>
<b>IV</b>	<b>Perhutanan Sosial</b>	<b>16</b>
<b>V</b>	<b>Penerapan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi</b>	<b>21</b>
<b>VI</b>	<b>Kolaborasi Evaluasi Perizinan</b>	<b>27</b>
<b>VII</b>	<b>Penutup</b>	<b>33</b>
	<b>Daftar Pustaka</b>	



**BEST PRACTICES KOLABORASI  
PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN  
CSO UNTUK PEMBANGUNAN  
RENDAH KARBON  
@2021**

**Penulis**

Jamalianuri  
Lulu Mahdiyah Sandjadirja  
Risanti Delphia  
Stevanny Limuria

**Infografik**

Alfons Yoshio Hartanto  
Arofatin Maulina Ulfa  
Fitria Nurhayati  
Hanna Farah Vania  
Jeany Hartriani  
Melati Kristina Andriarsi

**Editor**

Adek Media Roza  
Heri Susanto

**Desain**

Cicilia Sri Bintang Lestari  
Very Anggar Kusuma  
Muhamad Yana

**Foto**

123RF

  KATADATAcoid

  Katadata Indonesia

 katadatacoid

[www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)



**KOMITMEN  
MEMANGKAS  
GAS RUMAH  
KACA**



**E**mission Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Berbagai inisiatif di level global dijalankan untuk mengurangi emisi, salah satunya Kesepakatan Paris 2015, yang mendorong setiap negara untuk berkomitmen memangkas emisi sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi.

Indonesia, sebagai salah satu penandatangan Kesepakatan Paris, berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri, dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Komitmen tersebut tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang diserahkan kepada UNFCCC, sekretariat di bawah PBB yang bertugas mendukung pelaksanaan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Sumber: researchgate.net

Dalam pelaksanaannya, pengurangan emisi harus memperhatikan faktor ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Upaya yang hanya berfokus pada pemangkasan emisi tanpa memperhatikan sektor lain akan berdampak buruk pada kampanye pentingnya kelestarian lingkungan. Alih-alih, inisiatif aksi rendah karbon akan mendapat penentangan dari kelompok yang merasa dirugikan.

Karena kompleksitas tersebut, pengendalian perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca dalam Prioritas Nasional ke-6 pada RPJMN 2020-2024 menempatkan peningkatan kualitas hidup pada poin pertama. Adapun dua poin berikutnya adalah peningkatan ketahanan bencana dan iklim dan pembangunan rendah karbon. Dalam pelaksanaannya, dua poin terakhir juga harus memperhatikan keseimbangan antara lingkungan dan pembangunan ekonomi.

## KOMITMEN MEMANGKAS GAS RUMAH KACA

Inisiatif program pembangunan rendah karbon dilakukan pada bidang-bidang prioritas, yakni energi, lahan, limbah, industri, dan kelautan. Pembangunan rendah karbon diharapkan dapat mencapai target NDC dan *Net Zero Emission* melalui beberapa skenario. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah dua institusi yang bertanggung jawab terhadap program-program tersebut.

Keseriusan Indonesia dalam pembangunan rendah karbon untuk memangkas emisi akan menjadi sorotan dunia. Hal ini seiring dengan terpilihnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Co-Chair dari *the Coalition of Finance Ministers for Climate Action* periode 2021-2023. Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah KTT G20 2022 untuk penguatan kerjasama dalam perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan dengan tema *People, Planet, and Prosperity*.

Sebagai komitmen bangsa, maka pembangunan rendah karbon harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan (CSO), akademisi, dan warga lokal. Setiap *stakeholder* memiliki peran berbeda dengan kelebihan masing-masing. CSO yang bergerak di sektor lingkungan, misalnya, telah menyusun berbagai program untuk mendukung pembangunan rendah karbon, baik dari segi advokasi, pendampingan hingga pendanaan.

Peran masyarakat di sekitar sumber daya alam sangat penting karena mereka adalah pihak yang mengawal dan merasakan langsung dampak dari berbagai program yang dijalankan. Kolaborasi antar *stakeholder* akan mengoptimasi setiap kelebihan tersebut sehingga implementasi pembangunan rendah karbon dapat berjalan sesuai harapan.

Di berbagai daerah, kolaborasi inisiatif yang melibatkan berbagai *stakeholder* telah berjalan dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Program-program pemberdayaan ekonomi warga di sekitar hutan yang sejalan dengan kelestarian alam terbukti memberikan manfaat ekonomi bagi warga, dan memberi motivasi kepada masyarakat untuk lebih menjaga sumber daya alam yang mereka miliki.

Di tengah tuntutan global untuk mengurangi emisi dan tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, inisiatif-inisiatif yang digerakkan dan melibatkan berbagai *stakeholder* tersebut dapat menjadi percontohan bahwa pembangunan rendah karbon bisa dicapai dengan menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

**“CSO yang bergerak di sektor lingkungan, misalnya, telah menyusun berbagai program untuk mendukung pembangunan rendah karbon.”**

---

# AGENDA INDONESIA MENUJU PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Upaya Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dilakukan pada bidang-bidang prioritas yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

## BIDANG PRIORITAS PRK

Program

**Energi berkelanjutan**

Target 2024

Menuju porsi bauran EBT **23%**



### Pemulihan lahan

- Restorasi gambut **330 ribu/ tahun**
- Peningkatan luasan tutupan lahan **420 ribu/tahun**



### Pengelolaan limbah

Akumulasi sampah terkelola nasional **339,4 juta ton**

### Industri hijau

**10%** industri menengah-besar tersertifikasi SIH



### Pesisir dan laut

Luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai **50 ribu ha**



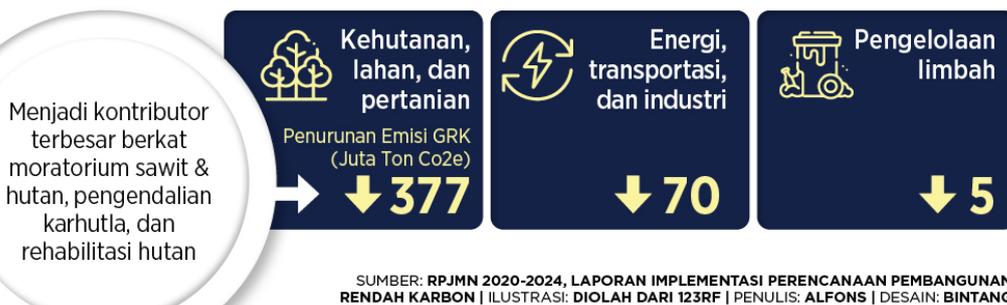
**Keterangan:**

Karhutla: Kebakaran hutan dan lahan

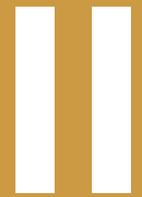
GRK: Gas Rumah Kaca

SIH: Standar Industri Hijau

## CAPAIAN PENURUNAN EMISI GRK (2018)



SUMBER: RPJMN 2020-2024, LAPORAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON | ILLUSTRASI: DIOLAH DARI 123RF | PENULIS: ALFONS | DESAIN: BINTANG



**ETALASE  
KOLABORASI  
PEMERINTAH,  
MASYARAKAT  
DAN CSO**



**P**embangunan rendah karbon merupakan upaya yang ditempuh untuk melestarikan lingkungan hidup dan memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan. Indonesia berkomitmen pembangunan rendah karbon yang merupakan mandat Kesepakatan Paris 2015.

Kolaborasi seluruh *stakeholder*, antara lain pemerintah, masyarakat sipil (CSO), dan warga lokal, sangat penting untuk mendorong suksesnya pembangunan rendah karbon. Di sejumlah daerah di Indonesia, berbagai inisiatif kolaborasi telah dijalankan dan menunjukkan bahwa kelestarian lingkungan bisa dicapai dengan tetap memperhatikan kesejahteraan warga.

Whitepaper, atau buku putih *Best Practices* Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan CSO untuk Pembangunan Rendah Karbon ini merupakan etalase empat program pilihan yang dianggap sukses melibatkan berbagai pihak. Dengan berbagai perbaikan, program tersebut berpotensi untuk direplikasi di daerah lain atau diperbesar skalanya.

Keempat program itu masing-masing terkait dengan pemeliharaan lahan gambut, perhutanan sosial, kampung ekonomi hijau berbasis EFT, dan pembatasan ekspansi lahan sawit. Keempat program tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Budidaya ikan gabus di Kabupaten Siak**

Kolaborasi masyarakat, CSO, dan aparat desa dan kabupaten untuk membuat kolam ikan gabus di lahan gambut. Gabus mengandung albumin, zat yang diperlukan untuk kesehatan. Usaha ini membuat warga menjaga kelestarian gambut (agar tetap basah) sekaligus memberi penghasilan yang lebih besar ketimbang menjadi petani sawit.

#### **2. Wisata alam Kalibiru, Yogyakarta**

Kalibiru adalah tujuan pelesir ikonik di Yogyakarta. Keindahan Kalibiru didukung oleh kelestarian ekosistem hutan yang lestari. Masyarakat, pemerintah, dan CSO berkolaborasi untuk mewujudkan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan menjadi sumber penghasilan.

#### **3. Kampung ekonomi hijau berbasis EFT di Jayapura**

Penerapan skema transfer fiskal berbasis ekologi untuk pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Jayapura menunjukkan hasil menggembirakan. Dana insentif untuk pemerintah desa digunakan untuk merevitalisasi penanaman coklat, membuat usaha petani semakin berkembang. Pendapatan petani meningkat dan hutan tetap terjaga.

#### **4. Kolaborasi evaluasi perizinan sawit di Papua Barat**

Ekspansi lahan sawit menjadi ancaman bagi kelestarian hutan di Papua Barat. Puluhan instansi pemerintah dari lintas sektoral, pusat dan daerah berkolaborasi dengan CSO untuk mengevaluasi izin-izin perkebunan sawit yang telah dikeluarkan pemerintah. Lahan izin yang dicabut dapat dikelola oleh masyarakat.

**“Di sejumlah daerah di Indonesia, berbagai inisiatif kolaborasi telah dijalankan dan menunjukkan bahwa kelestarian lingkungan bisa dicapai dengan tetap memperhatikan kesejahteraan warga.”**



III

# PELESTARIAN LAHAN GAMBUT



## BUDIDAYA IKAN GABUS UNTUK MENJAGA KELESTARIAN LAHAN GAMBUT

*Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya ikan membuat warga peduli untuk memastikan lahan tetap basah.*

**P**elestarian lahan gambut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan rendah karbon. Pembukaan lahan gambut yang masif akan melepaskan karbon yang selama ini tersimpan di dalam tanah. Dengan mempertahankan lahan gambut, maka potensi kebakaran hutan dan lahan juga dapat dikurangi.

Kabupaten Siak mengalami kebakaran hutan dan lahan pada 2019 pada 493 titik (*hotspot*). Meski terendah dibanding kabupaten lainnya di Riau, Siak yang memiliki lahan gambut yang luas berpotensi mengalami kebakaran lahan setiap tahun. Penyebab kebakaran adalah lahan gambut yang kering sehingga mudah tersulut api.

Permasalahan lahan gambut merupakan isu penting karena terkait dengan kelestarian lingkungan, di satu sisi, dan kegiatan ekonomi, di sisi lain. Pembukaan lahan gambut untuk berbagai kepentingan, termasuk perkebunan monokultur dituding sebagai penyebab kerusakan lahan. Namun, melestarikan lahan gambut semata tanpa memberikan manfaat ekonomi dianggap tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Apalagi, Kabupaten Siak tergolong memiliki lahan gambut yang luas berupa hutan rawa primer seluas 13.956,1 hektare (ha) dan hutan rawa sekunder seluas 150.619,5 ha. Luas hutan rawa gambut ini mencapai 17,6 persen wilayah kabupaten. Maka, pemanfaatan lahan gambut untuk keperluan ekonomi harus memperhatikan prinsip keberlanjutan sehingga masyarakat termotivasi untuk ikut serta menjaga lahan gambut agar tetap basah.

Kondisi inilah yang mendorong munculnya prakarsa budidaya ikan gabus di lahan gambut di Siak yang diinisiasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL). Selain menekan emisi karbon dan mencegah kebakaran, inisiatif tersebut juga menjadi jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Gabus merupakan salah satu ikan air tawar yang hidup di perairan gambut. Ikan lain yang hidup di lahan gambut adalah arwana, lele, betok, sepat, dan tambakan. Ikan gabus terkenal menghasilkan albumin yang berkualitas. Albumin adalah zat yang diperlukan untuk Kesehatan, antara lain mempercepat regenerasi sel. Selain itu, albumin banyak digunakan berbagai macam industri seperti industri kesehatan, pangan, hingga kecantikan.

# MANFAAT GANDA BUDIDAYA IKAN GABUS DI SIAK

Budidaya ikan gabus di Siak, Riau, berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga lahan gambut.

## MENGENAL BUDIDAYA GABUS DI SIAK



## BENTUK KOLABORASI

PemDes	PemKab	Dinas Perikanan Kabupaten	LTKL	PT Alam Siak Lestari
a. Pembentukan kelompok budidaya b. Pendanaan operasional	a. Penyaluran dana melalui skema TAKE b. Pembentukan payung hukum	a. Penyuluhan & pelatihan b. Penetapan gabus jadi produk unggulan	a. Merancang bisnis berkelanjutan b. Memberikan bimbingan	a. Mendirikan laboratorium ekstraksi albumin b. Mengelola bisnis

## MANFAAT

- Menjaga gambut & mencegah karhutla
- Penghasilan **2x lipat** dibanding sawit
- Memberikan nilai tambah **56%**
- Menjadi bahan baku industri kesehatan, pangan, kecantikan

Keterangan:

**LTKL:** Lingkar Temu Kabupaten Lestari  
**TAKE:** Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi

SUMBER: LTKL | ILUSTRASI: TIMOTHY ADRY | PENULIS: FITRIA NURHAYATI | DESAIN: VERY ANGGAR

---

Menurut kajian dari LTKL pada *Roadmap* Kabupaten Siak Hijau, ikan gabus dapat dimanfaatkan dan dijadikan mata pencaharian masyarakat. Pemanfaatan ikan gabus yang digagas adalah dengan meningkatkan nilai jualnya, yaitu mengekstrak kandungan albumin gabus. Estimasi pasar global albumin pada 2026 mencapai USD 6,7 miliar.

### **Kolaborasi Beragam *Stakeholder***

Ekstraksi albumin ikan gabus ini merupakan salah satu contoh kolaborasi yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Mulai dari warga setempat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan LTKL. Kolaborasi ini dapat berupa peraturan turunan yang mendukung keberlangsungan program, pendampingan, penyuluhan, pengelolaan bisnis dan anggaran yang baik, hingga pemasaran produk yang memiliki daya saing.

Pemerintah desa mendukung program ini dengan membuat aturan untuk membantu pembentukan kelompok budidaya gabus. Selain itu, desa membantu pengaturan kelompok dalam mempersiapkan kolam-kolam gabus. Pembelian pakan, bibit, dan operasional budidaya juga menggunakan dana desa.

Pemerintah Kabupaten Siak mengarahkan dan menyalurkan anggaran untuk desa-desa yang terlibat, yaitu melalui program dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE). Ini merupakan dana khusus yang disediakan untuk kabupaten yang memiliki program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Dinas Perikanan Kabupaten Siak juga membantu program ekstrak ikan gabus. Bantuan ini berupa penyuluhan dan pelatihan terkait pembibitan awal. Selaras dengan kebijakan *“One Village One Product”*, Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan bahwa ikan gabus adalah produk unggulan Desa Buntan Besar dan Desa Dayun.

LTKL juga memberi dukungan melalui bimbingan yang dilakukan oleh tim ahli, serta mematangkan bisnis ekstrak ikan gabus. Tim ahli ini membantu merancang program secara bisnis dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sedangkan, ekstraksi albumin dikelola oleh PT Alam Siak Lestari (ASL) yang pemegang sahamnya adalah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dari desa yang lahannya digunakan. Desa-desa tersebut adalah Buntan Besar dan Dayun. Sistem kepemilikan ASL dibentuk sedemikian agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat budidaya. ASL dikelola sekumpulan anak muda setempat dengan pengurus terdiri atas tiga direktur, delapan staf dan enam relawan.

**“Ekstraksi albumin ikan gabus ini merupakan salah satu contoh kolaborasi yang melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari warga setempat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan LTKL.”**

---

Produksi ekstrak albumin ikan gabus berlangsung di laboratorium yang dimiliki oleh ASL. Dengan adanya laboratorium ini, ASL dapat mengukur kualitas albumin yang diekstrak. Sebagai perbandingan, 1 kg ikan gabus dapat menghasilkan 1 persen atau setara dengan 10 gram albumin. Hal ini penting untuk mengetahui perlakuan dan cara budidaya ikan gabus yang paling tepat yang dapat menghasilkan albumin yang paling berkualitas.

### **Manfaat Budidaya Ikan Gabus**

Hasil kolaborasi antar sejumlah pihak di Kabupaten Siak ini membuktikan bahwa program pembangunan rendah karbon yang seimbang bisa diwujudkan, yaitu pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, aspek ekonomi, serta aspek kesejahteraan sosial.

Penghasilan masyarakat yang terlibat dalam budidaya gabus bahkan dua kali lipat lebih tinggi dibanding penghasilan saat menjadi petani sawit. Harga yang tinggi dan perencanaan yang baik menjadi kunci keberhasilan program ekstraksi albumin ini.

Satu kilogram ikan gabus dijual Rp 45.000. Adapun 1 kg gabus dapat menghasilkan 10 gram ekstrak albumin yang dapat dijual hingga Rp 70.000 atau menghasilkan nilai tambah hingga 56 persen. Saat ini, hasil ekstrak albumin digunakan untuk memasok kebutuhan lokal, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan apotek di Kabupaten Siak.

Selain ekstraksi albumin, bagian ikan gabus yang lain juga tetap dimanfaatkan secara maksimal. Dagingnya diproduksi juga menjadi tepung ikan, dan selebihnya dijadikan pupuk cair. Pemanfaatan secara maksimal ini juga dapat mendorong produksi secara *zero waste*. Budidaya gabus ini juga membuat masyarakat semakin peduli dengan kondisi gambut. Mereka berusaha menjaga agar lahan gambut tetap basah, sehingga kolam gabus—yang merupakan sumber mata pencaharian—terhindar dari kekeringan.

**“Program pembangunan rendah karbon yang seimbang bisa diwujudkan, yaitu pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, aspek ekonomi, serta aspek kesejahteraan sosial.”**

### **Peluang dan Tantangan**

Upaya ASL mengembangkan teknologi untuk pengembangbiakan dan produksi ikan gabus di kawasan gambut dengan produk akhir albumin merupakan contoh model bisnis strategi berkelanjutan yang dapat dilakukan masyarakat lokal. Keberhasilan ini bukan saja mendatangkan manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat serta kelestarian lingkungan lahan gambut, namun juga diapresiasi oleh universitas internasional.

---

ASL meraih penghargaan *MIT Solver Team Resilient Ecosystem & GM Prize Award* dalam sebuah kompetisi *MIT Solve Challenge 2021 (MIT Solve)*, yakni sebuah kompetisi internasional tahunan untuk mencari organisasi berbasis teknologi untuk memberikan solusi pada tantangan global. Kompetisi ini diselenggarakan oleh universitas asal Amerika Serikat, Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Berkaca dari keberhasilan ASL, model bisnis budidaya ikan gabus dengan produk akhir ekstrak albumin, tentunya bisa menjadi contoh pengelolaan lahan gambut di berbagai wilayah lain di Indonesia. Namun, tak bisa dimungkiri penerapan budidaya ikan gabus ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum tersedianya teknologi pembenihan ikan gabus secara terkontrol untuk meningkatkan dan menjaga konsistensi produksi jika ingin merambah pasar nasional atau global.

**“Model bisnis budidaya ikan gabus dengan produk akhir ekstrak albumin, tentunya bisa menjadi contoh pengelolaan lahan gambut di berbagai wilayah lain di Indonesia.”**

---





# IV PERHUTANAN SOSIAL



## KALIBIRU, ALAM LESTARI MEMBAWA REZEKI

*Kelestarian alam adalah kunci untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Masyarakat di Kalibiru, Yogyakarta, menikmati manfaat alam yang terjaga.*

**B**agi masyarakat di sekitarnya, hutan adalah sumber kehidupan. Ketergantungan terhadap hutan membuat masyarakat berkepentingan dengan kelestariannya. Inilah yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan program perhutanan sosial yang diinisiasi pemerintah. Dengan mendukung masyarakat mengelola hutan, maka mereka juga menjadi aktor yang menjaga keberlangsungan hutan, terutama dari pembalakan liar dan pencurian kayu.

Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat. Adapun pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus keseimbangan lingkungan dan sosial budaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menempatkan perhutanan sosial sebagai program pengentasan kemiskinan.

Target dari perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha. Hingga tahun lalu, realisasinya mencapai 4,2 juta ha. Program perhutanan sosial resmi diluncurkan pada 2015. “Awal adanya program ini karena ketidakadilan akses pemanfaatan hutan,” kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Supriyanto, seperti dikutip *Katadata.co.id*.

Usaha perhutanan sosial berfokus pada pengelolaan potensi yang berada di kawasan Perhutanan Sosial, yaitu meliputi pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan hasil hutan kayu (HHK), “Serta jasa lingkungan atau ekowisata yang berkelanjutan,” kata Nabhan Aiqani, spesialis pengelolaan pengetahuan KKI WARSI. Salah satu contoh jasa lingkungan atau ekowisata tersebut adalah pengelolaan wisata alam Kalibiru di Yogyakarta.

**“Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat.”**



# KALIBIRU, DARI HUTAN GUNDUL MENJADI PUSAT EKOWISATA

Kalibiru menjadi contoh sukses kolaborasi pemerintah & masyarakat dalam pengembangan ekowisata berbasis perhutanan sosial.

## MENGENAL KALIBIRU



Beroperasi sejak **2009**



Mempekerjakan **116 orang** (2018)



Dikelola oleh Kelompok **Tani HKm Mandiri**



Berlokasi di **Hutan Menoreh, Kulon Progo, DI Yogyakarta**



Sebelumnya **terbengkalai** akibat pembalakan liar



## BENTUK KOLABORASI



Pemerintah & LSM → memetakan wilayah potensi wisata



LSM Damar Sapto Tanjung & Peneliti → menjembatani pembentukan payung hukum HKm

## MANFAAT BAGI SEKITAR



Membuka lapangan kerja & mengurangi urbanisasi



Mempertahankan habitat satwa, khususnya burung



Mendukung pembangunan infrastruktur



Memberi bantuan dana untuk dusun

### Capaian



Meraih penghargaan **Wana Lestari** (2014)



Pengunjung melonjak **82%** (2014-2016)



Omzet mencapai **Rp 7,2 miliar** (2018)



Penghasilan HKm Mandiri mencapai **Rp 600 juta/bulan**

Keterangan: **LSM** (Lembaga Swadaya Masyarakat), **HKm** (Hutan Kemasyarakatan)

SUMBER: KATADATA, MONGABAY, LIPUTAN6 | FOTO: 123RF | PENULIS: HANNA FARAH VANIA | DESAIN: VERY ANGGAR



KATADATAcoid



Katadata Indonesia



katadatacoid

www.katadata.co.id



---

Wisata alam Kalibiru terletak di Jalan Waduk Sermo, Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dan dapat ditempuh dengan perjalanan bermotor kurang lebih satu jam dari Stasiun Tugu. Berada di ketinggian 450 mdpl, Kalibiru menyajikan pemandangan memukau. Perbukitan Menoreh diselimuti pepohonan hijau seperti cemara, jati, dan kayu putih. Ditambah Waduk Sermo yang berkelok membelah bukit, menambah keelokan.

**“Berada di ketinggian 450 mdpl, Kalibiru menyajikan pemandangan memukau. Perbukitan Menoreh diselimuti pepohonan hijau seperti cemara, jati, dan kayu putih.”**

---

### **Kolaborasi Bersama CSO dan Akademisi**

Wisata Alam Kalibiru dibuka pada akhir 2009 oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mandiri program Perhutanan Sosial. Sebelumnya, masyarakat mencari penghidupan dengan menanam tumbuhan semusim dan mengambil pohon yang bisa dijual. Akibatnya, hutan gersang. Aktivitas masyarakat pun dicap ilegal. Padahal Ketua Kelompok HKm Mandiri, Sisprajan, mengatakan warga merasa berhak memanfaatkan lahan karena hutan tersebut milik nenek moyang mereka.

Organisasi masyarakat sipil (CSO) Kemitraan dan Damar serta peneliti dari kampus kemudian turun tangan. Mereka menjembatani pemerintah dan masyarakat membuat payung hukum yang bisa mensejahterakan penduduk, sekaligus menjaga hutan tetap lestari. Setelah melewati proses panjang, akhirnya pada 2009 ditetapkan HKm Mandiri melakukan aktivitas jasa lingkungan. Pemerintah juga LSM membantu masyarakat memetakan wilayah tertentu yang memiliki potensi wisata.

Tidak mudah mengajak masyarakat untuk menyepakati wilayah kelompok menjadi jasa lingkungan. “*Background* kami petani, tidak tahu menahu soal manajemen wisata. Alhamdulillah kami dibantu banyak LSM dan pemda setempat,” kata Sis. “Sampai kami meyakini, kalau jasa lingkungan ini dikelola dengan benar, hasilnya luar biasa.”

Pertemuan dilakukan berkali-kali. Seringkali pertemuan baru bisa dilakukan pada malam hari. Saat itu, jalanan Kulonprogo belum sebegus sekarang. Jalanan masih berbatu besar. Belum banyak warga yang memiliki kendaraan. Para aktivis LSM kemudian mengantar jemput warga dengan motor atau mobil.

“Perjuangan itu luar biasa. Tapi kami tahu, kami sedang memperjuangkan masa depan banyak orang. Jadi kami juga semangat melakukannya,” kata Direktur LSM Damar Saptono Tanjung. LSM Damar merupakan salah satu LSM yang terlibat dalam perjuangan warga Kalibiru dan sekitarnya mendapatkan kejelasan hukum.

**“Perjuangan itu luar biasa. Tapi kami tahu, kami sedang memperjuangkan masa depan banyak orang. Jadi kami juga semangat melakukannya,”**

---

## Manfaat Ekonomi dari Alam Lestari

Ketika Desa Wisata Kalibiru baru dibuka, belum banyak pengunjung datang. Namun, setelah menjuarai lomba Wana Lestari pada 2014, pengunjung Kalibiru membludak. Wisatawan berasal dari dalam negeri sampai mancanegara. Dari catatan pengunjung, dalam satu hari pada 2016 pernah ada 7.000 wisatawan yang datang. Antrian sampai dua kilometer lebih.

Bertambahnya jumlah wisatawan, berimplikasi pada bertambahnya pekerja yang terlibat. Pengurus HKM merekrut penduduk setempat yang tidak punya pekerjaan. Sekarang sudah 99 persen masyarakat terlibat. “Ada juga yang dulunya kerja di kota-kota besar bahkan luar negeri, sekarang bekerja di sini. Ini mengurangi urbanisasi,” ujar Sis sambil tertawa bahagia.

Selain pengurus lokasi wisata, masyarakat lain di Kalibiru maupun luar Kalibiru pun mendapatkan berkahnya. Masyarakat membuka warung, menyediakan jasa parkir, penginapan, juga jasa mobil jeep.

Penghasilan anggota saat awal dibukanya wisata Kalibiru per bulannya hanya Rp 200-300 ribu. Pasca 2014, pendapatan kelompok rata-rata per bulannya mencapai Rp 600 juta. Pada bulan-bulan tertentu penghasilan bisa mencapai Rp 1 miliar. Menurut Sis, penghasilan anggota bisa mencukupi kebutuhan hidup. Hal itu terlihat dari rumah warga yang sudah lebih layak, ditambah kepemilikan kendaraan pribadi. “Kehidupan masyarakat sudah jauh lebih baik,” ujarnya.

Selain keuntungan ekonomi yang didapat perseorangan dan kelompok, dan dikurangi biaya operasional wisata, laba dari wisata Kalibiru juga dipergunakan untuk aksi sosial. Bangunan fisik hasil dari wisata Kalibiru berupa PAUD, masjid, ambil bagian dalam program bedah rumah, serta pengecoran jalan. Bentuk lainnya ada santunan anak yatim, santunan bagi fakir miskin, kegiatan masjid, juga bantuan dana untuk kelompok tani lainnya.

HKM Mandiri ingin kegiatan Perhutanan Sosial ini ada buktinya di masyarakat agar kegiatan ini juga berimbas dalam jangka panjang. “Memudahkan akses berkegiatan masyarakat dan membantu masyarakat bisa hidup layak,” kata Sis.

## Tantangan Pemain Baru

Layaknya sebuah usaha, wisata Kalibiru mengalami pasang surut. Jumlah pelancong berkurang sampai 50 persen dibanding 2017. Saptono Tanjung, dari Yayasan Damar, menuturkan, wisata Kalibiru menghadapi tantangan karena munculnya objek wisata serupa di sekitar desa. “Orang cenderung penasaran melihat tempat baru. Bisa jadi, itu salah satu penyebab berkurangnya wisatawan Kalibiru,” katanya.

Lokasi wisata alam di sekitar Kalibiru tersebut, menurut Sis, memiliki investor sehingga mereka tidak harus berjibaku dengan pendanaan untuk operasional. Namun Sis optimistis, dengan guyub rukun dan manajemen wisata yang terus diperbaiki, Kalibiru bisa bertahan. “Sejak 2014 kami

---

terus memperbaiki dan memperbarui Kalibiru dengan dana yang diputar dari wisatawan yang datang,” katanya,

Sis mengakui, apabila tidak didukung berbagai pihak, Kalibiru juga tidak akan jadi sukses ini. Secara kelembagaan, Kalibiru sudah tidak didampingi LSM mana pun, tapi komunikasi dan hubungan baik tetap berlanjut. “Saat kami butuh bantuan, mereka datang dan siap membantu. Berbagi ide supaya Kalibiru terus maju,” kata Sis.

**“Sis mengakui, apabila tidak didukung berbagai pihak, Kalibiru juga tidak akan jadi sukses ini.”**

---





V

**PENERAPAN  
SKEMA TRANSFER  
FISKAL BERBASIS  
EKOLOGI**



## KAMPUNG EKONOMI HIJAU BERBASIS EFT DI JAYAPURA

*Transfer fiskal berbasis ekologi untuk pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Jayapura digunakan untuk merevitalisasi penanaman coklat. Pendapatan petani meningkat, hutan tetap terjaga.*

Salah satu inisiatif pendanaan rendah karbon di Indonesia adalah melalui penerapan transfer fiskal berbasis ekologi atau *Ecological Fiscal Transfer* (EFT). Ini merupakan suatu formula pembagian anggaran dengan memperhitungkan aspek lingkungan hidup, seperti luas kawasan hutan di daerah dan keanekaragaman hayati. Alternatif sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Reboisasi dan lainnya.

Salah satu kelompok akademisi yang mulai mengembangkan wacana EFT sejak 2018 adalah *Research Center for Climate Change* Universitas Indonesia (RCCCU) yang membuat formula pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dengan melihat variabel luas hutan di daerah. Selain itu, *Biodiversity Finance Initiative* yang digagas oleh UNDP mendorong skema Dana Insentif Daerah untuk keanekaragaman hayati.

Skema insentif yang dikembangkan oleh The Asia Foundation (TAF) dan jaringan masyarakat sipil berbentuk transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang ada di bawahnya dalam yurisdiksi yang sama berdasarkan kewenangan dan kinerja perlindungan dan pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup.

Dalam naskah kebijakan EFT yang dikembangkan oleh TAF dan jaringan masyarakat sipil, skema TANE dirancang sebagai bagian dari Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) melalui skema DID dan DPL dengan memasukkan kriteria dan indikator ekologi. Untuk TAPE, dirancang sebagai bagian dari transfer bantuan keuangan provinsi. Sedangkan TAKE menjadi bagian dari bantuan keuangan kabupaten yang bersifat wajib yaitu Alokasi Dana Desa (ADD).

Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan skema transfer keuangan berbasis ekologi. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jayapura No. 11/2019 tentang Alokasi Dana Kampung atau Dana Desa (ADK/ADD), Kabupaten Jayapura. Dalam alokasi dana ADK ini, Pemkab Jayapura menambahkan proporsi alokasi insentif dan alokasi afirmasi, selain alokasi dasar dan proporsional.

**“Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan skema transfer keuangan berbasis ekologi.”**

### Skema Kolaborasi

Meskipun skema transfer fiskal berbasis ekologi merupakan formula yang diinisiasi oleh kelompok akademisi dan koalisi masyarakat sipil di berbagai daerah, dalam implementasinya, skema ini melibatkan berbagai *stakeholder* terkait lainnya, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat atau kelompok petani dan swasta.

Berbekal dana ADK dari Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pemerintah Desa Imsar di Lembah Grime yang dikenal sebagai penghasil kakao sejak zaman Belanda, berupaya merevitalisasi perkebunan kakao masyarakat yang sudah meredup. Kebun tidak lagi bisa diharapkan setelah diserang hama pada 2010 sehingga masyarakat sempat beralih menjadi perambah hutan.

Skema ini melibatkan sejumlah *stakeholder* terkait dengan peran dan tugas sebagai berikut:

- The Asia Foundation (TAF) bersama Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PT-PPMA) memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk membentuk kelompok kerja dan memberikan pelatihan pola tanam perkebunan kakao.
- Perusahaan inkubator perkumpulan usaha kecil (Pupuk) berperan menyambungkan ke pembeli, seperti perusahaan coklat di Makassar.
- Pemerintah Kabupaten Jayapura berperan memberikan anggaran tambahan sebagai insentif bagi kerja lebih terhadap pengembangan lingkungan di tingkat desa dengan pelibatan masyarakat dari mulai perencanaan hingga eksekusi program.
- Pemerintah desa yang mendapatkan dana insentif berperan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dan menjaga fungsi ekologis wilayahnya, seperti menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

### Manfaat Kolaborasi dalam Penerapan Skema EFT

Penerapan skema EFT di Kabupaten Jayapura menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dana insentif yang diberikan kepada pemerintah desa digunakan untuk merevitalisasi usaha penanaman coklat yang dijalankan oleh badan usaha milik kampung pada 2019. Pada saat itu, hanya 24 petani di kampung Imsar yang bersedia mengikuti revitalisasi tanaman kakao. Mereka mengikuti pelatihan di balai benih induk Papua, studi banding di perkebunan kakao di Jember dan Bogor, penggunaan bibit baru, serta pendampingan rutin.

**“Usaha kakao yang semula terpuruk kembali berkembang. Produktivitas dan kualitas kakao meningkat.”**

Setahun kemudian, para petani menikmati hasilnya. Usaha kakao yang semula terpuruk kembali berkembang. Produktivitas dan kualitas kakao meningkat. Kelompok tani bisa menjual 1 ton kakao kering per bulan senilai Rp 22 juta. Bahkan, menurut Deputi Direktur The Asia Foundation, Surya Alam Putra, pembeli kakao petani bukan hanya dari swasta. Pemerintah daerah juga membeli bibit kakao petani senilai Rp 3,6 miliar untuk pengembangan perkebunan di wilayah lainnya.

Melihat perkembangan positif tersebut, Kepala Kampung Imsar, Oscar Giay semakin bersemangat membangun ekonomi hijau berbasis komunal di kampungnya. Untuk itu, dia memperbaiki RPJM Kampung periode 2019–2024 dengan memasukkan program Kampung Ekonomi Hijau. Pemerintah kampung mengalokasikan dana untuk misi ekonomi hijau. Petani yang terlibat bertambah dari semula 35 kepala keluarga menjadi dua kali lipat. Bahkan, pemuda dan perempuan ikut bekerja.

Karena program ini berjalan dengan baik, warga dari kampung tetangga ikut membeli bibit kakao dari kampung Imsar sehingga perekonomian berbasis coklat di sejumlah desa di Jayapura ini tumbuh. Produsen dan pengusaha coklat pun tertarik untuk meluncurkan produk coklat Papua dengan bahan baku dari kakao petani Jayapura. Dampak lainnya, pemerintah desa bisa mencegah masyarakat merambah hutan yang mendorong deforestasi.

Program ini sejalan dengan Visi 2010 Tujuan Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menuju pembangunan rendah karbon yang memberikan pertumbuhan yang adil, berkelanjutan secara ekologis, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk asli Papua. Keberhasilan program percontohan pengembangan kampung ekonomi hijau di Jayapura ini mendorong tekad kelompok masyarakat sipil untuk memperjuangkan skema EFT menjadi skema nasional.

**“Dampak lainnya, pemerintah desa bisa mencegah masyarakat merambah hutan yang mendorong deforestasi.”**



### Peluang dan Tantangan

Penerapan skema transfer fiskal berbasis ekologi (EFT) merupakan salah satu contoh program potensial pembangunan rendah karbon yang terbukti berhasil menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan kegiatan perekonomian di beberapa daerah. Keberhasilan dalam pelaksanaan skema atau program ini tentu berpotensi untuk direplikasi atau diperluas penerapannya di daerah lainnya.

Namun, penerapan EFT juga menghadapi tantangan. Kajian Lembaga Penyelidik Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menyebutkan bahwa meskipun skema EFT sangat potensial, namun penerapannya menghadapi sejumlah kendala, seperti dana pemerintah pusat untuk EFT masih sangat minim, belum ada komitmen anggaran dari pemda, keterbatasan data dan indikator pengukur, serta sasaran dan tingkat realisasi yang masih rendah.

Adanya pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada penerapan skema ini. Pandemi mengakibatkan daerah harus melakukan *refocusing* anggaran sehingga pendanaan dari pusat maupun daerah untuk melakukan transfer fiskal berbasis ekologi menjadi terhambat.

**“Keberhasilan dalam pelaksanaan skema atau program ini tentu berpotensi untuk direplikasi atau diperluas penerapannya di daerah lainnya.”**



# TRANSFER FISKAL JAGA HUTAN & MASYARAKAT TANAH PAPUA

Transfer fiskal berbasis ekologis di Papua berdampak positif pada pelestarian hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

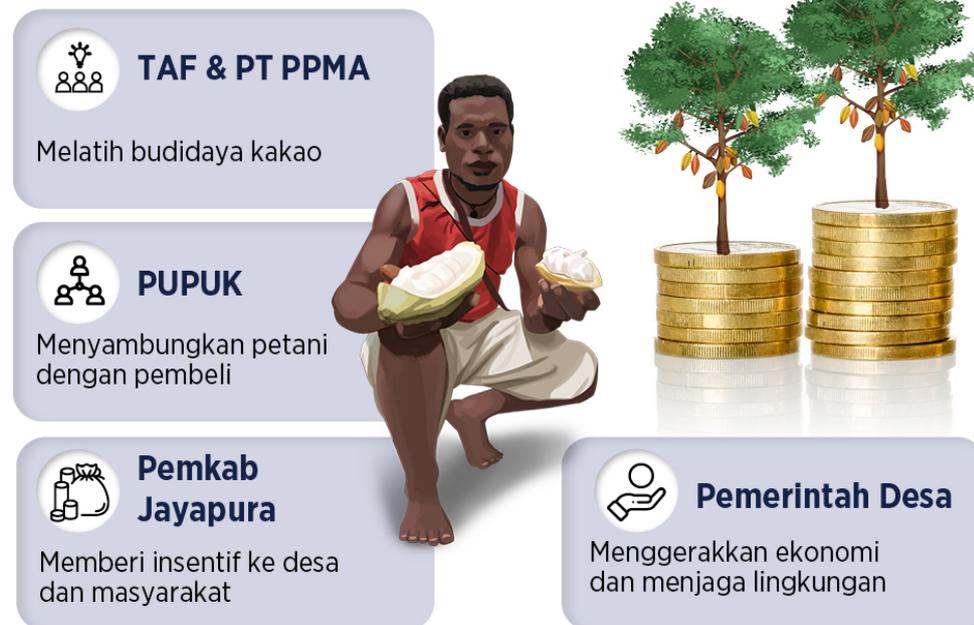
## SKEMA BERJENJANG

Diberikan berdasarkan kinerja pengelolaan hutan dan lingkungan



\*) belum diterapkan

## KOLABORASI MULTI-PIHAK



## MANFAAT TRANSFER FISKAL DI PAPUA



**Keterangan:** TAF: The Asia Foundation  
PUPUK: Perusahaan Inkubator Perkumpulan Usaha Kecil  
PT PPMA: Perkumpulan Terbatas Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat

SUMBER: THE ASIA FOUNDATION, KATADATA INSIGHT CENTER |  
ILUSTRASI: JOSHUA DAN 123RF |  
PENULIS: MELATI | DESAIN: BINTANG

An aerial photograph of a lush green valley. The foreground shows a river winding through the landscape, surrounded by dense green trees and vegetation. In the background, rolling hills and mountains are covered in thick forest. The overall scene is vibrant and natural. The text is overlaid on the right side of the image.

# VI

## KOLABORASI EVALUASI PERIZINAN



## MENJAGA PERMADANI HIJAU PAPUA BARAT

*Kolaborasi dalam pengambilan kebijakan merupakan langkah penting dalam pelestarian lingkungan.*

**H**amparan hutan di Provinsi Papua Barat berkontribusi 8,12 persen dari seluruh tutupan hutan hujan tropis di tanah air. Rimba raya ini merupakan rumah besar yang menyimpan keanekaragaman hayati yang unik, gabungan dari kekayaan alam khas Asia dan Australia. Tak pelak, di tengah deforestasi yang terus terjadi, urgensi untuk mempertahankan tutupan hutan di Papua Barat kian menguat.

Terlebih, hutan Papua Barat, yang merupakan sumber inspirasi budaya dan kehidupan masyarakat adat, berkontribusi terhadap masyarakat global karena menyimpan jutaan metrik ton karbon. Pembukaan lahan akan melepaskan karbon yang merupakan gas rumah kaca sehingga berdampak pada perubahan iklim. Padahal, Indonesia telah berkomitmen memangkas emisi sesuai dengan Kesepakatan Paris 2015.

Namun, kenyataan di lapangan memberi alasan kuat bagi kekhawatiran rusaknya hutan di Papua Barat. Pada 2015, tercatat lima izin usaha perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua. Namun pada 2017 melonjak menjadi 114 izin usaha. Saat ini terdapat 24 perusahaan pemegang izin pemanfaatan lahan di provinsi tersebut. Luas konsesinya mencapai 5576 ribu ha.

Moratorium dan evaluasi perizinan menjadi salah satu upaya yang krusial untuk menghentikan ekspansi perkebunan monokultur tersebut. Evaluasi perizinan berpotensi mendukung target Deklarasi Manokwari, yaitu mewujudkan kawasan hutan lindung sebesar 70 persen dari total wilayah. Pada saat ini, luasan hutan lindung dan konservasi Papua Barat mencapai 34,8 persen dari total wilayah. Dengan evaluasi, luasan hutan lindung dapat ditingkatkan menjadi 62 persen.

Deklarasi Manokwari dicetuskan pada 10 Oktober 2018, yang menegaskan komitmen pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat di Tanah Papua. Poin ketiga dalam deklarasi itu menyatakan komitmen kuat untuk menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan terkait sumber daya alam dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan, menerapkan moratorium izin-izin baru perkebunan skala besar, pertambangan dan industri berbasis lahan, serta meninjau ulang izin-izin yang telah terbit dengan membentuk tim kerja khusus untuk itu.

**“Evaluasi perizinan berpotensi mendukung target Deklarasi Manokwari, yaitu mewujudkan kawasan hutan lindung sebesar 70 persen dari total wilayah.”**

### Kolaborasi Evaluasi

Evaluasi perizinan lahan perkebunan sawit dimulai sejak 2018. Selain Deklarasi Manokwari, landasan hukumnya adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau Inpres Moratorium Sawit dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.

Ada tiga tujuan utama evaluasi tersebut: 1. Perbaiki Tata Kelola Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, 2. Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, dan 3. Upaya Menjaga Luas Tutupan hutan. Selain demi kelestarian lingkungan, penataan lahan tersebut juga ditujukan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya pada warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Sebagai komitmen bersama, kolaborasi menjadi penting dalam proses evaluasi. Para pihak yang terlibat antara lain Pemerintah Provinsi Papua Barat (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, delapan bupati di Papua Barat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Yayasan EcoNusa. Econusa membantu dalam hal analisis hukum dan tata ruang.

Seperti dikutip situs *Econusa*, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Jacob Fonataba, mengatakan total wilayah konsesi dari 24 perusahaan yang telah dievaluasi seluas lebih dari 640 ribu ha. Kawasan konsesinya berada di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Fakfak. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuh atau 383.431 ha diperkirakan masih berupa hutan.

Hasil evaluasi menunjukkan semua perusahaan melakukan pelanggaran yang dibagi menjadi tiga kategori: 1. Tidak melanjutkan proses perizinan, 2. Melanggar izin dan belum membuka lahan, dan 3. Perusahaan yang telah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau melakukan penanaman. Seluruh perusahaan di kategori nomor tiga memiliki pelanggaran dengan tipologi yang berbeda-beda.

Evaluasi izin sawit tersebut mendapat dukungan masyarakat. “Proses ini menjadi harapan besar masyarakat adat dalam menyuarakan keinginan yang harus disampaikan. Cara pandang masyarakat adat dan pemerintah harus masuk dalam satu sistem yang sama. Hutan merupakan kebutuhan dasar karena masyarakat Papua adalah peramu tulen,” kata Ketua Perkumpulan Generasi Muda (PGM) Malaumkarta, Torianus Kalami, seperti dikutip *Econusa*.

**“Selain demi kelestarian lingkungan, penataan lahan tersebut juga ditujukan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya pada warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.”**

---

## Manfaat bagi Masyarakat dan Negara

Laporan *Katadata.co.id* menyebutkan, dari sekitar 650 ribu ha izin sawit di Papua Barat, hanya sekitar 52 ribu ha yang benar-benar ditanam pohon sawit. “Potensi kerugian negara dari pajak sangat besar dari masalah ini,” kata CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar.

Oleh sebab itu, hasil hasil evaluasi per Oktober 2021 adalah mencabut izin 14 konsesi dan mengurangi luasan 2 konsesi dari 24 perusahaan sawit di Papua Barat. Pencabutan tersebut mendapat perlawanan, khususnya di Kabupaten Sorong. Namun, Bupati Sorong Johny Kamuru, mengatakan pencabutan izin sudah berdasarkan penilaian menyeluruh.

Johny mengatakan, lahan yang izinnnya dicabut tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ada beberapa kemungkinan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat di lahan eks konsesi. Pertama, skema perhutanan sosial. Kedua, skema hutan adat. Ketiga, skema pengakuan tanah ulayat komunal. Keempat, skema lain seperti *food estate* berbasis kampung. “Kami melihat lahan yang belum dimanfaatkan perlu dikembalikan ke masyarakat adat atau pemilik hak ulayat,” ujar Johny.

**“Kami melihat lahan yang belum dimanfaatkan perlu dikembalikan ke masyarakat adat atau pemilik hak ulayat.”**

---



### Tantangan pasca moratorium

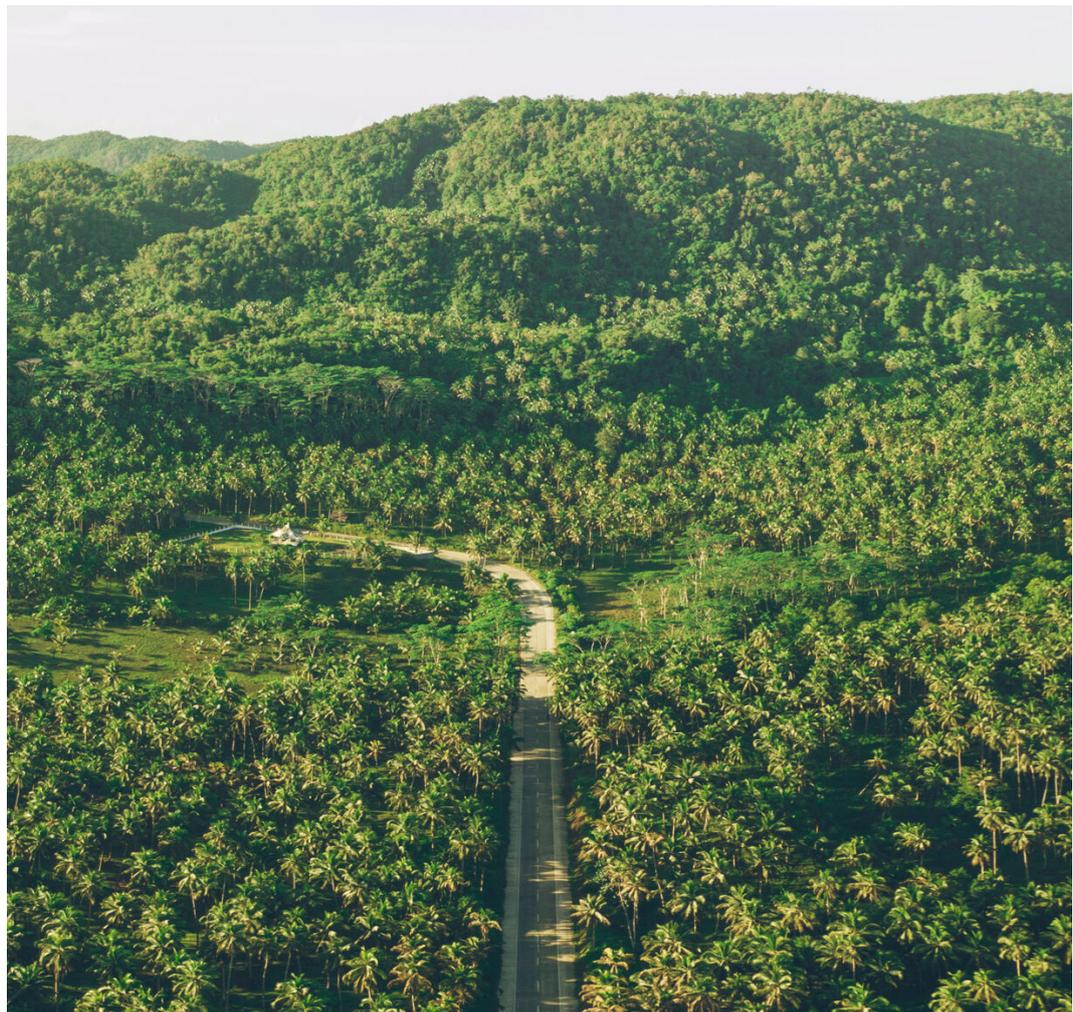
Evaluasi lahan sawit di Papua Barat dilakukan bersamaan dengan moratorium penerbitan izin yang dimulai sejak September 2018 hingga September 2021. Berakhirnya moratorium menjadi kekhawatiran upaya evaluasi tidak maksimal karena terbitnya izin-izin baru. Oleh sebab itu, Bupati Johnny berharap evaluasi terus diberlakukan. “Kami menyangkan apabila tidak diperpanjang,” katanya.

Pendiri Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya mengatakan perpanjangan kebijakan moratorium sawit masih diperlukan karena tata kelola perizinan industri ini belum selesai. Berdasarkan data yang mereka kumpulkan di akhir 2020, terdapat 111,9 juta ha izin sawit tak

bertutupan, 10,7 juta ha izin sawit bertutupan, dan 8,4 juta ha lahan sawit tidak memiliki izin.

Dari data itu terbukti masih banyak lahan yang tidak jelas statusnya. Di sisi lain, tidak banyak pemerintah daerah melakukan evaluasi perizinan sawit di wilayahnya. Padahal, penilaian ini menjadi penting agar kegiatan perkebunan tidak merugikan negara dan hutan Papua yang disebut permadani hijau timur tetap lestari.

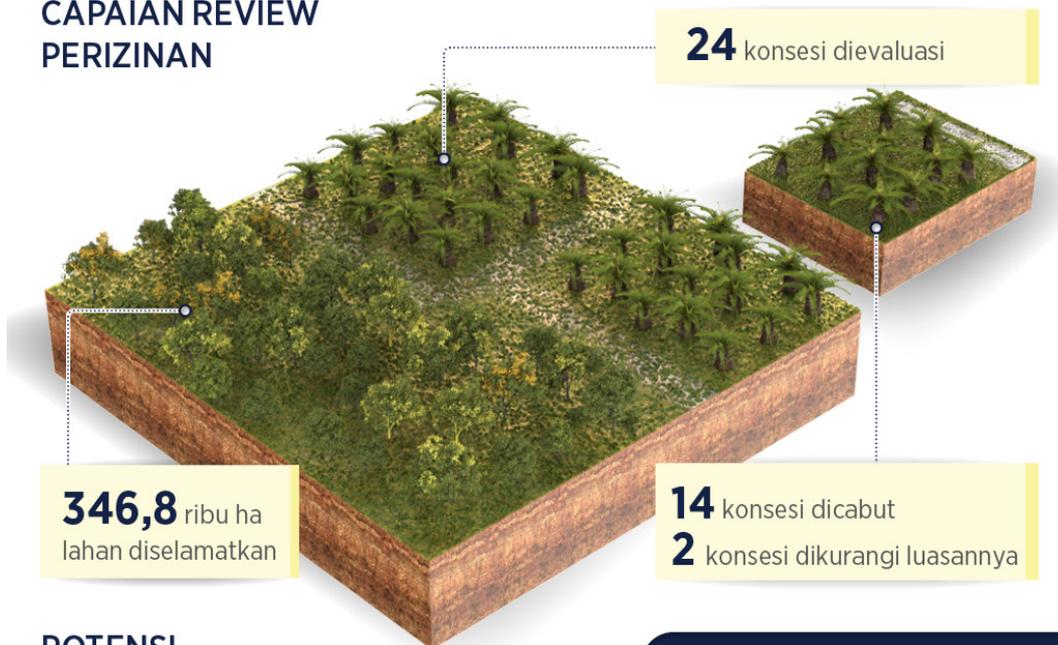
**“Perpanjangan kebijakan moratorium sawit masih diperlukan karena tata kelola perizinan industri ini belum selesai.”**



# REVIEW IZIN SAWIT DUKUNG EKONOMI TANAH PAPUA

Belasan konsesi dicabut sebagai hasil review izin perkebunan sawit di Papua Barat. Lahan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat adat.

## CAPAIAN REVIEW PERIZINAN



## POTENSI EKONOMI BERKELANJUTAN

- 

Masyarakat adat mengelola SDA berbasis kearifan lokal
- 

Memanfaatkan hutan dengan tetap melestarikan alam
- 

Menggunakan skema Perhutanan Sosial, hutan adat, dan pengakuan tanah ulayat

Keterangan:  
**HGU:** Hak Guna Usaha

SUMBER: ECONUSA | ILUSTRASI: TIMOTHY ADRY  
PENULIS: FITRIA NURHAYATI | DESAIN: NUNIK SEPTIYANTI

## BASIS EVALUASI

### Dasar Hukum

1. Inpres 8/2018 tentang Moratorium Sawit
2. Deklarasi Manokwari
3. Gerakan Nasional Penyelamatan SDA

### Kategori Pelanggaran

1. Administrasi  
Terkait izin usaha, izin pemanfaatan kayu, HGU
2. Operasional  
Terkait persoalan kebun inti plasma, lahan gambut, kawasan hutan

# VII

# PENUTUP





**P**emangkasan emisi gas rumah kaca merupakan pilihan yang terhindarkan untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen mengurangi emisi karbon, sesuai dengan Kesepakatan Paris 2015.

Sebagai komitmen nasional, upaya menurunkan emisi memerlukan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (CSO). Penurunan emisi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan rendah karbon menjadi pilihan.

Praktik-praktik program ekonomi rendah karbon yang dipaparkan dalam buku putih ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat dijaga. Kegiatan yang bertumpu pada konservasi lingkungan terbukti dapat mendapatkan manfaat ekonomi bagi para pelakunya.

Inisiatif-inisiatif di berbagai daerah itu juga menunjukkan bahwa kolaborasi menjadi prasyarat suksesnya program yang dicanangkan. Setiap pihak atau pemangku kepentingan memainkan peranan penting dan memiliki keunggulan masing-masing, yang jika digabungkan dapat menjadi modal penting pembangunan rendah karbon.

Tentu saja masih ada tantangan di setiap program yang diulas di buku putih ini. Namun, tantangan dapat menjadi peluang bila komitmen kolaborasi para pihak terus diperkuat. Tantangan tersebut antara lain menjaga keberlanjutan bisnis, meningkatkan skala usaha, dan konsistensi kebijakan untuk mendukung inisiatif pembangunan rendah karbon yang telah dijalankan.

Dengan kolaborasi yang semakin kuat, maka program-program yang telah terbukti mendatangkan manfaat lingkungan dan ekonomi diharapkan dapat replikasi di daerah lain. Dengan demikian, paradigma pengelolaan sumber daya alam dapat berubah, bahwa kelestarian alam akan membawa kesejahteraan, alih-alih merusak kelestarian alam demi kegiatan bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alsaffar, N.M.A. 2019. *Sustainable Development and Renewable Energies and Their Application in Some Modern Residential Complexes*. ResearchGate, 19, hal 270-275.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Katadata Indonesia. 2019. *Menjaga Hutan Papua dari Ekspansi Sawit*. <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a4c53b9154/menjaga-hutan-papua-dari-ekspansi-sawit> (Diakses 29 September 2021).
- Masripatin, dkk. 2017. *Strategi Implementasi NDC*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Nurhayati, F. 2020. *Magnet Wisata Kalibiru, Mengelola Alam Jadi Berkah*. Katadata Indonesia. <https://katadata.co.id/padjar/berita/5f8e5a54d4b3b/magnet-wisata-kalibiru-mengelola-alam-jadi-berkah> (Diakses 29 September 2021).
- Nurhayati, dkk. 2021. *Menakar Peluang Pemanfaatan Minyak Jelantah Untuk Biodiesel*. Katadata Indonesia. <https://katadata.co.id/timrisetdanpublikasi/analisisdata/5ff67457daed7/menakar-peluang-pemanfaatan-minyak-jelantah-untuk-biodiesel> (Diakses 29 September 2021).
- Nurchayadi, G. 2019. *Inisiatif Siak Hijau, Cara Kabupaten Siak Cegah Karhutla*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/264353/inisiatif-siak-hijau-cara-kabupaten-siak-cegah-karhutla> (Diakses 29 September 2021).
- Pemerintah Kabupaten Siak. 2019. *Peta Jalan Siak Kabupaten Hijau*. Sedagho Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak.
- Portal Informasi Indonesia. 2019. *Insentif untuk Daerah Penjaga Lingkungan*. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/sosial/insentif-untuk-daerah-penjaga-lingkungan> (Diakses 29 September 2021).
- Putra, dkk. 2019. *Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE DAN TANE*. The Asia Foundation.
- Putra, L.M. 2021. *Mengembalikan Hutan Papua Barat kepada Pemiliknya*. <https://econusa.id/id/ecoblog/mengembalikan-hutan-papua-barat-kepada-pemiliknya/> (Diakses 29 September 2021).

Rosadi, D. 2021. *Minyak Jelantah Bisa Penuhi Sebagian Kebutuhan Biodiesel Nasional*. *Katadata Indonesia*. <https://katadata.co.id/doddyrosadi/berita/5ff6deecb9dde/minyak-jelantah-bisa-penuhi-sebagian-kebutuhan-biodiesel-nasional> (Diakses 29 September 2021).

Tobing, S. 2021. *Menggantung Nasib Perpanjangan Moratorium Sawit*. *Katadata Indonesia*. <https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/614c4b6550dd5/menggantung-nasib-perpanjangan-moratorium-sawit> (Diakses 29 September 2021).

Wijaya, R. 2021. *Perusahaan Masyarakat Asal Siak Menjadi Finalis di Kompetisi Internasional*. <https://www.kabupatenlestari.org/en/perusahaan-masyarakat-asal-siak-menjadi-finalis-di-kompetisi-internasional/> (Diakses 29 September 2021).

Yoshio, A. 2021. *Pemanfaatan Jelantah Jadi Biodiesel di Daerah*. *Katadata Indonesia*. <https://katadata.co.id/padjar/berita/5ff836256be7a/pemanfaatan-jelantah-jadi-biodiesel-di-daerah> (Diakses 29 September 2021).



**Best Practices Kolaborasi  
Pemerintah, Masyarakat dan  
CSO untuk Pembangunan  
Rendah Karbon**

---

**Buku Putih 2021**